



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU .

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.....

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);

19. Peraturan Pemerintah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

33. Peraturan Menteri.....

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

40. Peraturan Menteri.....✓

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/Pmk.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011);
43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);

48. Peraturan Daerah.....✓

49. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 2);
54. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 13);
55. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.11/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1.....✓

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil.....

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan Pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 2.390.195.122.090 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp 403.581.043.282 sehingga menjadi Rp 2.793.776.165.372 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah.....✓...

1. Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp 2.161.979.898.219
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 390.478.578.228</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.552.458.476.447
2. Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp 2.390.195.122.090
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 403.581.043.282</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp 2.793.776.165.372</u>
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan:	
1) Semula	Rp 238.215.223.871
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.102.465.054</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 251.317.688.925
b. Pengeluaran Pembiayaan:	
1) Semula	Rp 10.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0.00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 241.317.688.925
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Lampiran VII.....✓

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatas.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Malinau.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 18 Oktober 2023.

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 18 Oktober 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 23.

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.09	Pajak Reklame	232.791.900	232.791.900	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720	159.879.720	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720	159.879.720	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	72.912.180	72.912.180	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	72.912.180	72.912.180	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.985.378.164	1.985.378.164	0	0 %
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	191.855.664	191.855.664	0	0 %
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	191.855.664	191.855.664	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.793.522.500	1.793.522.500	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.793.522.500	1.793.522.500	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.465.310.000	1.468.310.000	3.000.000	0 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000	381.150.000	0	0 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000	381.150.000	0	0 %
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	93.170.000	96.170.000	3.000.000	3 %
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	93.170.000	96.170.000	3.000.000	3 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya	990.990.000	990.990.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya	990.990.000	990.990.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000	1.300.000.000	100.000.000	8 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000	850.000.000	50.000.000	6 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000	850.000.000	50.000.000	6 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4.1.01.09	Pajak Reklame	232.791.900	232.791.900	0	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720	159.879.720	0	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720	159.879.720	0	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	72.912.180	72.912.180	0	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	72.912.180	72.912.180	0	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.985.378.164	1.985.378.164	0	0	0 %
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	191.855.664	191.855.664	0	0	0 %
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	191.855.664	191.855.664	0	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber lain	1.793.522.500	1.793.522.500	0	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber lain	1.793.522.500	1.793.522.500	0	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.465.310.000	1.465.310.000	0	0	0 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000	381.150.000	0	0	0 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000	381.150.000	0	0	0 %
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	93.170.000	96.170.000	3.000.000	3 %	3 %
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	93.170.000	96.170.000	3.000.000	3 %	3 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya	990.990.000	990.990.000	0	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya	990.990.000	990.990.000	0	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000	1.300.000.000	100.000.000	8 %	8 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000	850.000.000	50.000.000	6 %	6 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000	850.000.000	50.000.000	6 %	6 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13 %	13 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13 %
4.1.02	Retribusi Daerah	1.916.985.900	1.958.274.100	41.288.200	2 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	886.711.800	928.000.000	41.288.200	5 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	670.000.000	550.000.000	(120.000.000)	18 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	420.000.000	400.000.000	(20.000.000)	5 %
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	250.000.000	150.000.000	(100.000.000)	40 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	50.000.000	50.000.000	100 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0	50.000.000	50.000.000	100 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	196.691.800	325.000.000	128.308.200	65 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	24.272.500	26.000.000	1.727.500	7 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	172.419.300	299.000.000	126.580.700	73 %
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	1.500.000	0	(1.500.000)	100 %
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	18.520.000	0	(18.520.000)	100 %
4.1.02.01.10.0002	Retribusi Perkantoran	17.520.000	0	(17.520.000)	100 %
4.1.02.01.10.0003	Retribusi Industri	1.000.000	0	(1.000.000)	100 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	3.000.000	3.000.000	100 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takai, Timbang, dan Perlengkapannya	0	3.000.000	3.000.000	100 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	918.774.100	918.774.100	0	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	513.774.100	523.774.100	10.000.000	2 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	498.774.100	498.774.100	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	10.000.000	25.000.000	15.000.000	150 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	34.000.000	5.000.000	(29.000.000)	85 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	30.000.000	1.000.000	(29.000.000)	97 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000	0	(1.000.000)	100 %
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000	0	(1.000.000)	100 %
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	370.000.000	390.000.000	20.000.000	5 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	370.000.000	390.000.000	20.000.000	5 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	111.500.000	111.500.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000	110.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000	110.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000	1.500.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000	1.500.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.350.680.716	3.600.000.000	249.319.284	7 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.350.680.716	3.600.000.000	249.319.284	7 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716	3.500.000.000	249.319.284	8 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716	3.500.000.000	249.319.284	8 %
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.610.000.000	42.160.000.000	1.550.000.000	4 %
4.1.04.05	Jasa Giro	510.000.000	2.010.000.000	1.500.000.000	294 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	300 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	300 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	0	0	0 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.096.789.869.986	2.484.373.437.071	387.583.567.085	18 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.056.077.671.000	2.404.590.415.074	348.512.744.074	17 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.941.687.764.000	2.286.953.742.074	345.265.978.074	18 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	985.772.699.000	1.331.245.950.074	345.473.251.074	35 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	58.380.613.000	97.122.867.667	38.742.254.667	66 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.135.748.000	6.154.023.708	1.014.275.708	20 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/MPOPDN	181.910.000	262.620.709	80.710.709	44 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	7.104	7.104	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.295.692.000	18.509.515.899	2.213.823.899	14 %
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	11.830.607.000	11.883.420.567	52.813.567	0 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	272.162.000	954.439.099	682.277.099	251 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	877.671.308.000	1.169.270.464.321	291.599.156.321	33 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan-(PSDH)	14.660.295.000	25.748.227.000	11.087.932.000	76 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000	1.340.364.000	0	0 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	809.470.515.000	809.470.515.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	809.470.515.000	809.470.515.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.351.587.000	76.144.714.000	(207.273.000)	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	420.928.000	420.928.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.204.217.000	2.204.217.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.206.473.000	7.206.473.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.317.324.000	0	(23.317.324.000)	100 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penggunaan-Jalan	17.761.547.000	40.871.598.000	23.110.051.000	130 %
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	10.158.073.000	0	(10.158.073.000)	100 %
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	699.919.000	699.919.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	12.588.506.000	12.588.506.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penggunaan	1.995.000.000	1.995.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penggunaan	0	10.158.073.000	10.158.073.000	100 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70.092.563.000	70.092.563.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.439.560.000	18.439.560.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.843.809.000	17.843.809.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.091.000.000	2.091.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.810.541.000	5.810.541.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.018.900.000	2.018.900.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	714.360.000	714.360.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.910.013.000	17.910.013.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000	338.918.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.729.180.000	2.729.180.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.370.000	318.370.000	0	0 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	604.212.000	604.212.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000	417.400.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	438.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.500.000	417.500.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	114.389.907.000	117.636.673.000	3.246.766.000	3 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	114.389.907.000	117.636.673.000	3.246.766.000	3 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	114.389.907.000	117.636.673.000	3.246.766.000	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	79.783.021.997	39.070.823.011	96 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986	62.138.664.764	21.426.465.778	53 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.712.198.986	62.138.664.764	21.426.465.778	53 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.522.680.000	5.471.222.386	1.948.542.386	55 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.058.140.000	4.785.873.593	1.727.733.593	56 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.184.239.218	47.811.894.173	17.627.654.955	58 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.695.288	423.230.132	122.534.844	41 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.646.444.480	3.646.444.480	0	0 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	17.644.357.233	17.644.357.233	100 %
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0	2.650.000.000	2.650.000.000	100 %
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	2.650.000.000	2.650.000.000	100 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	14.994.357.233	14.994.357.233	100 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	14.994.357.233	14.994.357.233	100 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	20 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	20 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	20 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	20 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	20 %
	Jumlah Pendapatan	2.161.979.898.219	2.552.458.476.447	390.478.578.228	18 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.498.252.718.796	1.657.642.626.230	159.389.907.434	11 %
5.1.01	Belanja Pegawai	686.792.812.531	729.204.841.535	42.412.029.004	6 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	357.346.322.585	380.024.557.582	22.678.234.997	6 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	291.538.895.771	308.557.606.828	17.018.711.057	6 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	237.915.925.271	256.434.071.795	18.518.146.524	8 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	53.622.970.500	52.123.535.033	(1.499.435.467)	3 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.209.531.789	17.304.867.967	1.095.336.178	7 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.483.603.149	16.198.218.717	714.615.568	5 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	725.928.640	1.106.649.250	380.720.610	52 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.273.399.956	8.142.629.198	869.229.242	12 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.073.399.956	7.942.629.198	869.229.242	12 %
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.852.168.625	8.319.386.000	467.217.375	6 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.152.168.625	7.619.386.000	467.217.375	7 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.583.939.401	4.422.649.906	838.710.505	23 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.152.349.401	3.483.894.906	331.545.505	11 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	431.590.000	938.755.000	507.165.000	118 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.125.775.481	11.727.895.344	602.119.863	5 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.317.930.081	10.606.507.554	288.577.473	3 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPK	807.845.400	1.121.387.790	313.542.390	39 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	466.162.969	824.959.246	358.796.277	77 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	436.137.969	781.459.246	345.321.277	79 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK	30.025.000	43.500.000	13.475.000	45 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.101.382	40.248.803	147.421	0 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.843.408	39.912.168	68.760	0 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPK	257.974	336.635	78.661	30 %
5.1.01.01.09	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	16.657.839.355	17.921.055.193	1.263.215.838	8 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS	15.441.267.731	16.257.074.724	815.806.993	5 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PPK	1.216.571.624	1.663.980.469	447.408.845	37 %
5.1.01.01.10	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	435.840.907	461.257.232	25.416.325	6 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	395.773.227	409.019.552	13.246.325	3 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPK	40.067.680	52.237.680	12.170.000	30 %
5.1.01.01.11	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	1.204.493.340	1.255.762.625	51.269.285	4 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Luran Jaminan Kematian PNS	1.104.291.714	1.120.735.148	16.443.434	1 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Luran Jaminan Kematian PPK	100.201.626	135.027.477	34.825.851	35 %
5.1.01.01.12	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	958.173.609	1.046.239.240	88.065.631	9 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	908.173.609	996.239.240	88.065.631	10 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPK	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	256.473.076.418	266.673.805.119	10.200.728.701	4 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	220.803.877.084	226.922.167.491	6.118.290.407	3 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	203.876.277.084	204.739.904.552	863.627.468	0 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPK	16.927.600.000	22.182.262.939	5.254.662.939	31 %
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	12.957.525.028	14.484.962.500	1.527.437.472	12 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	11.957.725.028	12.268.712.500	310.987.472	3 %
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	999.800.000	2.216.250.000	1.216.450.000	122 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	15.603.190.706	17.069.456.507	1.466.265.801	9 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	15.603.190.706	17.069.456.507	1.466.265.801	9 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.108.483.600	8.197.218.621	1.088.735.021	15 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.108.483.600	8.111.128.173	1.002.644.573	14 %
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0	86.090.448	86.090.448	100 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	37.862.532.600	45.824.344.580	7.961.811.980	21 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	17.843.809.000	18.047.824.080	204.015.080	1 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	17.843.809.000	18.047.824.080	204.015.080	1 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.810.541.000	5.835.933.900	25.392.900	0 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.810.541.000	5.835.933.900	25.392.900	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.091.000.000	9.000.275.000	6.909.275.000	330 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.091.000.000	9.000.275.000	6.909.275.000	330 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.117.182.600	12.940.311.600	823.129.000	7 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.773.622.600	12.565.921.600	792.299.000	7 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	179.870.000	210.700.000	30.830.000	17 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	163.690.000	163.690.000	0	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.383.673.372	10.383.673.372	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	489.327.300	489.327.300	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	489.327.300	489.327.300	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244	31.814.244	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244	31.814.244	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798	43.906.798	0	0 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798	43.906.798	0	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730	42.485.730	0	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730	42.485.730	0	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	709.524.585	709.524.585	0	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	709.524.585	709.524.585	0	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163	71.618.400	11.959.237	20 %	20 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163	71.618.400	11.959.237	20 %	20 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372	19.797.372	0	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372	19.797.372	0	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.920.000	3.874.920.000	0	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.920.000	3.874.920.000	0	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000	1.193.640.000	0	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000	1.193.640.000	0	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575	96.870.575	0	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575	96.870.575	0	0	0 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembiayaan Gaji DPRD	3.000.000	3.000.000	0	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembiayaan Gaji DPRD	3.000.000	3.000.000	0	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	378.602.754	378.602.754	0	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	378.602.754	378.602.754	0	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	52.000.000	52.000.000	0	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	128.322.360	128.322.360	0	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.024.810.000	3.024.810.000	0	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.024.810.000	3.024.810.000	0	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851	403.355.614	(11.959.237)	3 %	3 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851	403.355.614	(11.959.237)	3 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	392.403.356	392.403.356	0	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.970.391	61.519.787	(450.604)	1 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.970.391	61.519.787	(450.604)	1 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280	8.288.280	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280	8.288.280	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600	106.563.600	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600	106.563.600	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965	7.635.965	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965	7.635.965	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000	21.000.000	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000	21.000.000	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	450.604	450.604	100 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	450.604	450.604	100 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	186.420.960	186.420.960	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	186.420.960	186.420.960	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	722.480.000	722.480.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	312.480.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	312.480.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000	410.000.000	0	0 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000	410.000.000	0	0 %
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.591.724.200	0	(4.591.724.200)	100 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.591.724.200	0	(4.591.724.200)	100 %
5.1.01.88.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.591.724.200	0	(4.591.724.200)	100 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	19.020.600.000	25.183.577.526	6.162.977.526	32 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	19.020.600.000	25.183.577.526	6.162.977.526	32 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	19.020.600.000	25.183.577.526	6.162.977.526	32 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.925.844.711	763.876.554.091	83.950.709.380	12 %
5.1.02.01	Belanja Barang	254.817.802.510	286.989.018.552	32.171.216.042	13 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	254.766.683.810	286.930.011.352	32.163.327.542	13 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	734.550.240	872.802.349	138.252.109	19 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	21.100.000	21.100.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.761.071.502	14.529.298.600	1.768.227.098	14 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	58.331.000	83.931.000	25.600.000	44 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.770.574.800	6.797.546.800	26.972.000	0 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.054.026	10.391.026	7.337.000	240 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	181.116.000	182.226.000	1.110.000	1 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	4.299.415.000	813.350.000	(3.486.065.000)	81 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.230.648.740	7.837.703.920	2.607.055.180	50 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	560.773.200	576.061.200	15.288.000	3 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.972.845.031	11.576.451.900	603.606.869	6 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.748.659.619	10.320.451.413	2.571.791.794	33 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	72.582.948	104.832.948	32.250.000	44 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.883.800	8.883.800	0	0 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.609.180.556	1.059.052.936	(2.550.127.620)	71 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	814.906.700	1.061.219.700	246.313.000	30 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	467.327.000	718.427.000	251.100.000	54 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	141.400.000	39.788.000	(101.612.000)	72 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.405.893.590	3.179.293.590	773.400.000	32 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.339.083.010	3.836.878.210	497.795.200	15 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	20.354.000	20.354.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.515.244.000	2.580.425.016	65.181.016	3 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	131.627.575.899	145.822.590.056	14.195.014.157	11 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.249.711.636	23.572.818.406	323.106.770	1 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.902.414.013	25.521.045.982	8.618.631.969	51 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	865.290.000	865.290.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	981.145.500	1.066.157.500	85.012.000	9 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	437.300.000	437.300.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	580.000.000	240.000.000	(340.000.000)	59 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.667.500.000	11.817.500.000	3.150.000.000	36 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	233.000.000	313.000.000	80.000.000	34 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	340.000.000	340.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	505.000.000	1.339.850.000	834.850.000	165 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	696.994.000	606.744.000	(90.250.000)	13 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.161.858.000	8.635.246.000	1.473.388.000	21 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	36.900.000	36.000.000	(900.000)	2 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	51.118.700	59.007.200	7.888.500	15 %
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	12.813.800	25.583.800	12.770.000	100 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	17.910.000	900.000	(17.010.000)	95 %
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	20.394.900	32.523.400	12.128.500	59 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	198.065.540.553	228.898.929.221	30.833.388.668	16 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	170.968.810.095	195.327.574.582	24.358.764.487	14 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.469.072.296	4.155.655.296	(313.417.000)	7 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.644.909.300	12.522.224.300	5.877.315.000	88 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	27.000.000	27.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	432.368.000	359.768.000	(72.600.000)	17 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	197.900.000	197.900.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.049.600.000	2.624.340.000	574.740.000	28 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	642.000.000	759.000.000	117.000.000	18 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.075.715.000	16.682.266.200	1.606.551.200	11 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.191.113.000	8.650.275.074	1.459.162.074	20 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	205.000.000	205.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keterampilan, Keterampilan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.932.000.000	1.980.000.000	48.000.000	2 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	369.600.000	369.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	57.600.000	43.200.000	(14.400.000)	25 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.046.000.000	1.646.300.000	600.300.000	57 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.751.850.000	1.894.050.000	(857.800.000)	31 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	101.624.214.602	101.198.740.199	(425.474.403)	0 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.517.910.000	2.009.204.000	(508.706.000)	20 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.890.951.482	3.900.036.374	(990.915.108)	20 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.327.375.000	800.165.000	(527.210.000)	40 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	601.535.000	216.355.000	(385.180.000)	64 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	385.000.000	0	(385.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	207.545.300	247.545.300	40.000.000	19 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	217.041.000	465.132.000	248.091.000	114 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	15.540.000	175.540.000	160.000.000	1.030 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	66.600.000	66.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.085.000.000	9.122.032.000	8.037.032.000	741 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	140.000.000	140.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	374.990.000	374.990.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	312.800.000	312.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	250.000.000	0	(250.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	50 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	609.741.000	4.471.675.000	3.861.934.000	633 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	280.500.000	227.200.000	(53.300.000)	19 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	768.831.234	2.611.945.134	1.843.113.900	240 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.449.003.851	9.877.014.365	2.428.010.514	33 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.044.307.440	2.318.787.440	274.480.000	13 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.153.196.590	891.572.800	(261.623.790)	23 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.560.000.000	1.563.661.100	3.661.100	0 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0	2.070.000.000	2.070.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.250.260.868	12.714.470.049	464.209.181	4 %
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	959.868.868	1.424.078.049	464.209.181	48 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	10.290.392.000	10.290.392.000	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	700.000.000	553.480.000	(146.520.000)	21 %
5.1.02.02.03.0011	Belanja Sewa Tanah Hutan	700.000.000	553.480.000	(146.520.000)	21 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	858.000.000	3.899.601.500	3.041.601.500	354 %
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	1.500.000	1.500.000	100 %
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	196.000.000	331.540.000	135.540.000	69 %
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	42.000.000	42.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	454.000.000	364.000.000	(90.000.000)	20 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0	1.035.000.000	1.035.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0	1.450.000.000	1.450.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	66.000.000	84.000.000	18.000.000	27 %
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	142.000.000	142.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	0	299.561.500	299.561.500	100 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	442.596.000	606.692.000	164.096.000	37 %
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	350.396.000	442.492.000	92.096.000	26 %
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	7.200.000	79.200.000	72.000.000	1.000 %
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	35.000.000	35.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	330.000.000	330.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	130.000.000	130.000.000	0	0 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.552.385.990	5.733.253.490	180.867.500	3 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.712.386.000	2.743.631.000	31.245.000	1 %
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0	90.000.000	90.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	411.000.000	325.000.000	(86.000.000)	21 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	708.999.990	808.999.990	100.000.000	14 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	900.000.000	900.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.000.000	35.622.500	15.622.500	78 %
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	555.000.000	555.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	245.000.000	245.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	231.650.000	231.650.000	100 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	165.000.000	165.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi layanan-Jasa Khusus	0	14.000.000	14.000.000	100 %
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	0	52.650.000	52.650.000	100 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.955.294.000	5.660.804.000	2.705.510.000	92 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.698.294.000	3.899.804.000	2.201.510.000	130 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.257.000.000	1.761.000.000	504.000.000	40 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.008.193.600	3.741.403.600	(266.790.000)	7 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	763.608.600	453.161.600	(310.447.000)	41 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.244.585.000	3.288.242.000	43.657.000	1 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan *	7.072.392.605	8.400.412.265	1.328.019.600	19 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.496.427.478	7.636.991.078	1.140.563.600	18 %
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.380.000	14.380.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.058.184.920	4.236.696.820	178.511.900	4 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	244.000.000	244.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0	169.365.000	169.365.000	100 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	641.670.900	760.410.900	118.740.000	19 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	378.389.200	379.116.900	727.700	0 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	590.000.000	590.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0	342.435.000	342.435.000	100 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	73.140.000	108.140.000	35.000.000	48 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Komputer-Peralatan Jaringan	496.662.458	671.446.458	174.784.000	35 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.400.000	343.856.000	187.456.000	120 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	156.400.000	293.856.000	137.456.000	88 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	419.565.127	419.565.127	0	0 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	29.999.237	29.999.237	0	0 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	389.565.890	389.565.890	0	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	170.100.623.443	197.215.176.116	27.114.552.673	16 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.081.638.443	197.196.191.116	27.114.552.673	16 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.901.638.443	197.016.191.116	27.114.552.673	16 %
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	180.000.000	180.000.000	0	0 %
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	18.985.000	18.985.000	0	0 %
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Aluar Negeri	18.985.000	18.985.000	0	0 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.577.561.000	5.651.900.000	2.074.339.000	58 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.577.561.000	5.651.900.000	2.074.339.000	58 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	318.561.000	2.914.400.000	2.595.839.000	815 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.739.000.000	2.542.500.000	803.500.000	46 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0	195.000.000	195.000.000	100 %
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.520.000.000	0	(1.520.000.000)	100 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.497.432.600	14.523.775.710	(11.973.656.890)	45 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.497.432.600	14.523.775.710	(11.973.656.890)	45 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.497.432.600	14.523.775.710	(11.973.656.890)	45 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.794.492.000	22.197.342.287	2.402.850.287	12 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.794.492.000	22.197.342.287	2.402.850.287	12 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.794.492.000	22.197.342.287	2.402.850.287	12 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000.000	35.806.311.000	5.806.311.000	19 %
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000	4.736.311.000	(263.689.000)	5 %
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000	4.736.311.000	(263.689.000)	5 %
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000	4.736.311.000	(263.689.000)	5 %
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	25.000.000.000	31.070.000.000	6.070.000.000	24 %
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	25.000.000.000	31.070.000.000	6.070.000.000	24 %
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	25.000.000.000	31.070.000.000	6.070.000.000	24 %
5.1.05	Belanja Hibah	90.028.206.854	108.932.016.254	18.903.809.400	21 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.728.206.854	107.761.666.254	18.033.459.400	20 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.964.212.248	42.094.723.159	15.130.510.911	56 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.023.452.248	37.817.663.159	14.794.210.911	64 %
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.940.760.000	4.277.060.000	336.300.000	9 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.085.000.000	16.270.344.500	7.185.344.500	79 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.800.000.000	16.270.344.500	7.470.344.500	85 %
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	285.000.000	0	(285.000.000)	100 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	52.034.445.006	47.956.598.595	(4.077.846.411)	8 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	51.983.445.006	47.956.598.595	(4.026.846.411)	8 %
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	51.000.000	0	(51.000.000)	100 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	284.549.600	80.000.000	(204.549.600)	72 %
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	284.549.600	80.000.000	(204.549.600)	72 %
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.360.000.000	1.360.000.000	0	0 %
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.360.000.000	1.360.000.000	0	0 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0	370.350.000	370.350.000	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	756.950.000	756.950.000	100 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	756.950.000	756.950.000	100 %
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	113.400.000	113.400.000	100 %
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	113.400.000	113.400.000	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.505.854.700	19.822.903.350	8.317.048.650	72 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.418.690.600	16.669.825.000	8.251.134.400	98 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.418.690.600	16.669.825.000	8.251.134.400	98 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.418.690.600	16.669.825.000	8.251.134.400	98 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.087.164.100	3.153.078.350	65.914.250	2 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	357.536.100	89.356.350	(268.179.750)	75 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	357.536.100	89.356.350	(268.179.750)	75 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.729.628.000	3.063.722.000	334.094.000	12 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.729.628.000	3.063.722.000	334.094.000	12 %
5.2	BELANJA MODAL	535.642.798.685	576.587.168.533	40.944.369.848	8 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.337.169.338	12.607.144.171	2.269.974.833	22 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.337.169.338	12.607.144.171	2.269.974.833	22 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK.

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6.846.028.000	4.602.508.033	(2.243.519.967)	33 %
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	6.500.000.000	0	(6.500.000.000)	100 %
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0	1.157.000.000	1.157.000.000	100 %
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	3.010.798.608	3.010.798.608	100 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil lainnya	346.028.000	434.709.425	88.681.425	26 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.491.141.338	8.004.636.138	4.513.494.800	129 %
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	3.491.141.338	3.491.141.338	0	0 %
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0	4.513.494.800	4.513.494.800	100 %
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	185.000.893.813	208.929.698.413	23.928.804.600	13 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.085.281.000	79.019.768.667	2.934.487.667	4 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	65.418.027.000	67.378.414.667	1.960.387.667	3 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	28.900.000.000	30.534.400.000	1.634.400.000	6 %
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	22.200.000.000	16.715.600.000	(5.484.400.000)	25 %
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	5.282.000.000	11.082.237.667	5.800.237.667	110 %
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0 %
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	36.027.000	46.177.000	10.150.000	28 %
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.995.000.000	3.045.000.000	1.050.000.000	53 %
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0	900.000.000	900.000.000	100 %
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	1.995.000.000	2.145.000.000	150.000.000	8 %
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	8.672.254.000	8.596.354.000	(75.900.000)	1 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	731.500.000	45.000.000	(686.500.000)	94 %
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	900.000.000	1.500.000.000	600.000.000	67 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	6.991.814.000	7.002.414.000	10.600.000	0 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	48.940.000	48.940.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya				

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	45.291.688.380	54.893.188.380	9.601.500.000	21 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	44.290.593.380	51.701.593.380	7.411.000.000	17 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.535.363.380	18.720.325.380	4.184.962.000	29 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13.363.440.000	14.378.478.000	1.015.038.000	8 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.942.000.000	2.080.000.000	138.000.000	7 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	13.505.170.000	15.258.170.000	1.753.000.000	13 %
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	944.620.000	1.264.620.000	320.000.000	34 %
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.001.095.000	2.491.595.000	1.490.500.000	149 %
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	985.000.000	985.000.000	0	0 %
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0	1.050.000.000	1.050.000.000	100 %
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	16.095.000	456.595.000	440.500.000	2.737 %
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0	700.000.000	700.000.000	100 %
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0	700.000.000	700.000.000	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	698.910.000	536.142.500	(162.767.500)	23 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	32.100.000	32.100.000	0	0 %
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	2.500.000	2.500.000	0	0 %
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	29.600.000	29.600.000	0	0 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	666.810.000	504.042.500	(162.767.500)	24 %
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	61.000.000	61.000.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	240.500.000	240.500.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	175.380.000	175.380.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	185.000.000	21.000.000	(164.000.000)	89 %
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	4.930.000	6.162.500	1.232.500	25 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	24.534.000	48.534.000	24.000.000	98 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	24.534.000	48.534.000	24.000.000		98 %
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	24.534.000	48.534.000	24.000.000		98 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.796.636.402	28.956.803.923	6.160.167.521		27 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.347.539.840	5.161.760.340	814.220.500		19 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Pertengkapan Kantor	18.906.000	50.416.000	31.510.000		167 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.328.633.840	5.111.344.340	782.710.500		18 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.408.590.562	23.754.537.583	5.345.947.021		29 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.733.593.197	10.881.091.199	147.498.002		1 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.278.700.000	1.278.700.000	0		0 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.754.917.000	2.294.750.000	539.833.000		31 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.986.552.365	7.527.342.384	4.540.790.019		152 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadaman Kebakaran	1.654.828.000	1.772.554.000	117.626.000		7 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.506.000	40.506.000	0		0 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.551.000	3.551.000	0		0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	36.955.000	36.955.000	0		0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.383.182.560	17.243.014.048	7.859.831.488		84 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.299.080.060	17.041.021.548	7.741.941.488		83 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.071.016.000	4.456.826.000	385.810.000		9 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	4.557.410.660	11.721.160.063	7.163.749.403		157 %
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	90.000.000	90.000.000	0		0 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	580.653.400	773.035.485	192.382.085		33 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	84.102.500	201.992.500	117.890.000		140 %
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	64.102.500	179.682.500	115.580.000		180 %
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	20.000.000	20.000.000	0		0 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	2.310.000	2.310.000	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.365.540.606	11.107.971.650	742.431.044	7 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.508.842.512	2.832.026.044	1.323.183.532	88 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	251.781.500	291.926.734	40.145.234	16 %
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	872.850.000	804.088.000	(68.762.000)	8 %
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	297.837.512	596.592.000	298.754.488	100 %
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0	1.053.045.810	1.053.045.810	100 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	86.373.500	86.373.500	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.856.698.094	8.275.945.606	(580.752.488)	7 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.656.698.094	8.275.945.606	(580.752.488)	7 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	362.639.180	385.294.060	22.654.880	6 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	179.144.300	183.194.300	4.050.000	2 %
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0	4.050.000	4.050.000	100 %
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	32.813.000	32.813.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	146.331.300	146.331.300	0	0 %
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	165.390.000	165.390.000	0	0 %
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	165.390.000	165.390.000	0	0 %
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydodinamica	18.104.880	31.709.760	13.604.880	75 %
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	18.104.880	31.709.760	13.604.880	75 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13.074.367.485	11.958.886.895	(1.115.480.590)	9 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.665.020.985	9.269.870.395	(1.395.150.590)	13 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	349.521.185	419.260.395	69.739.210	20 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.315.499.800	8.850.610.000	(1.464.889.800)	14 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.409.346.500	2.689.016.500	279.670.000	12 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.557.569.000	1.669.303.000	111.734.000	7 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	721.169.000	850.436.500	129.267.500	18 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	130.608.500	169.277.000	38.668.500	30 %
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	50.302.000	111.297.000	60.995.000	121 %
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	50.302.000	111.297.000	60.995.000	121 %
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	50.302.000	111.297.000	60.995.000	121 %
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	13.050.000	13.050.000	0	0 %
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	13.050.000	13.050.000	0	0 %
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	13.050.000	13.050.000	0	0 %
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	61.340.000	61.340.000	0	0 %
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	61.340.000	61.340.000	0	0 %
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	61.340.000	61.340.000	0	0 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.273.530.000	1.273.530.000	0	0 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	1.273.530.000	1.273.530.000	0	0 %
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	1.273.530.000	1.273.530.000	0	0 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	16.500.000	16.500.000	0	0 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.500.000	16.500.000	0	0 %
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	16.500.000	16.500.000	0	0 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	42.040.000	287.720.000	245.680.000	584 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	42.040.000	287.720.000	245.680.000	584 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	42.040.000	287.720.000	245.680.000	584 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	21.000.000	21.000.000	100 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	21.000.000	21.000.000	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	21.000.000	21.000.000	100 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.326.444.200	2.460.749.290	(1.865.694.910)	43 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.326.444.200	2.460.749.290	(1.865.694.910)	43 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.326.444.200	2.460.749.290	(1.865.694.910)	43 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.134.908.000	534.908.000	(600.000.000)	53 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.134.908.000	534.908.000	(600.000.000)	53 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.134.908.000	534.908.000	(600.000.000)	53 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.950.481.561	202.338.655.895	10.388.174.334	5 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	190.847.146.601	201.994.089.434	11.146.942.833	6 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.957.335.601	196.294.278.434	10.336.942.833	6 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	53.065.853.770	47.312.092.720	(5.753.761.050)	11 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.235.922.604	1.291.912.604	55.990.000	5 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	46.955.301.600	48.376.176.987	1.420.875.387	3 %
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	836.755.800	1.236.355.800	399.600.000	48 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.979.225.377	43.793.736.077	5.814.510.700	15 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	21.763.283.349	26.944.032.349	5.180.749.000	24 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.799.999.500	4.376.815.200	1.576.815.700	56 %
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	9.571.200.000	9.571.200.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	585.000.000	975.640.000	390.640.000	67 %
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.212.349.991	2.961.349.991	749.000.000	34 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	871.730.000	750.580.000	(121.150.000)	14 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	60.680.000	60.680.000	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7.380.713.610	7.893.706.706	512.993.096	7 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.889.811.000	5.699.811.000	810.000.000	17 %
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.140.000.000	4.920.000.000	780.000.000	19 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	749.811.000	749.811.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.103.334.960	344.566.461	(758.768.499)	69 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.103.334.960	344.566.461	(758.768.499)	69 %
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	715.234.960	344.566.461	(370.668.499)	52 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	388.100.000	0	(388.100.000)	100 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.572.213.973	148.198.964.854	3.626.750.881	3 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	102.797.962.999	105.576.811.030	2.778.848.031	3 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	84.781.962.999	86.345.355.030	1.563.392.031	2 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	84.681.962.999	86.245.355.030	1.563.392.031	2 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	18.016.000.000	19.231.456.000	1.215.456.000	7 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	18.016.000.000	18.931.456.000	915.456.000	5 %
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0	300.000.000	300.000.000	100 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.827.210.178	24.265.966.028	438.755.850	2 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.036.505.960	4.192.768.660	156.262.700	4 %
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.036.505.960	4.192.768.660	156.262.700	4 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengaliran Pasang Surut	5.999.999.676	5.999.999.676	0	0 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	5.999.999.676	5.999.999.676	0	0 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.790.704.542	14.073.197.692	282.493.150	2 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.790.704.542	14.073.197.692	282.493.150	2 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	439.440.786	458.940.786	19.500.000	4 %
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	439.440.786	439.440.786	0	0 %
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	439.440.786	439.440.786	0	0 %
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0	19.500.000	19.500.000	100 %
5.2.04.03.08.0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	0	19.500.000	19.500.000	100 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	17.507.600.010	17.897.247.010	389.647.000	2 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.999.990.620	11.197.169.620	197.179.000	2 %
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	10.999.990.620	11.197.169.620	197.179.000	2 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.105.409.390	5.297.877.390	192.468.000	4 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.105.409.390	5.297.877.390	192.468.000	4 %
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	1.402.200.000	1.402.200.000	0	0 %
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	1.402.200.000	1.402.200.000	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.055.040.000	259.977.200	(1.795.062.800)	87 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	179.977.200	179.977.200	100 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0	155.977.200	155.977.200	100 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0	155.977.200	155.977.200	100 %
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0	24.000.000	24.000.000	100 %
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0	24.000.000	24.000.000	100 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.055.040.000	80.000.000	(1.975.040.000)	96 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.055.040.000	80.000.000	(1.975.040.000)	96 %
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.055.040.000	80.000.000	(1.975.040.000)	96 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.727.000.000	4.252.728.000	2.525.728.000	146 %
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.677.000.000	4.202.728.000	2.525.728.000	151 %

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.677.000.000	4.202.728.000	2.525.728.000	151 %
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.377.000.000	1.277.000.000	(100.000.000)	7 %
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.000.000	2.825.728.000	2.625.728.000	1.313 %
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.904.142.047	260.904.142.047	200.000.000.000	328 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047	260.904.142.047	200.000.000.000	328 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047	260.904.142.047	200.000.000.000	328 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047	260.904.142.047	200.000.000.000	328 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047	260.904.142.047	200.000.000.000	328 %
5.4	BELANJA TRANSFER	295.395.462.562	298.642.228.562	3.246.766.000	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.481.234.162	1.481.234.162	0	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.481.234.162	1.481.234.162	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.481.234.162	1.481.234.162	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.481.234.162	1.481.234.162	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	293.914.228.400	297.160.994.400	3.246.766.000	1 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	293.914.228.400	297.160.994.400	3.246.766.000	1 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	293.914.228.400	297.160.994.400	3.246.766.000	1 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	293.914.228.400	297.160.994.400	3.246.766.000	1 %
Jumlah Belanja		2.390.195.122.090	2.793.776.165.372	403.581.043.282	17 %
Total Surplus/(Defisit)		(228.215.223.871)	(241.317.688.925)	(13.102.465.054)	-6 %

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.215.223.871	251.317.688.925	13.102.465.054		6 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.215.223.871	251.317.688.925	13.102.465.054		6 %
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	238.215.223.871	251.317.688.925	13.102.465.054		6 %
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	238.215.223.871	251.317.688.925	13.102.465.054		6 %
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	238.215.223.871	251.317.688.925	13.102.465.054		6 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	238.215.223.871	251.317.688.925	13.102.465.054		6 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	0		0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0		0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000	10.000.000.000	0		0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	0		0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	0		0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	0		0 %
	Pembiayaan Netto	228.215.223.871	241.317.688.925	13.102.465.054		6 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)		100 %

